BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisa

2.1.1 Pengertian Analisa

Analisa dapat dilakukan terhadap berbagai segi aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik maupun hal lainnya. Analisa oleh para ahli diartikan cukup beragam. Analisa menurut Dale Yoder diartikan sebagai prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis (Yoder dalam Mangkunegara, 2001:13). Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam melakukan suatu analisa perlu dilakukan beberapa prosedur yang berhubungan fakta-fakta yang akan diamati. Adanya prosedur tersebut maka akan terjadinya pemecahan bagian-bagian dalam melakukan suatu pengamatan.

Pendapat lain mengenai analisa juga diungkapkan oleh Supriyono, sebagai penelusuran kesempatan atau tantangan atau sumber. Analisa juga melibatkan pemecahan suatu keseluruhan kedalam bagian-bagian untuk mengetahui sifat, fungsi dan saling berhubungan antar bagian tersebut (Supriyono, 1990:89). Analisa sangat diperlukan atau penting karena sifat dari lingkungan sangat dinamis dan berubah dengan cepat.

Menurut Dale Yoder seperti yang dikutif oleh A.A. Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan analisis didefinisikan sebagai: “Prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan

dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis" (dalam Anwar, 2001:13).

Berdasarkan hal di atas bahwa dalam menganalisis peneliti melakukan kajian terhadap suatu objek riset dengan terlebih dahulu memecahnya ke dalam beberapa bagian. Kemudian dilakukan pengujian atas bagian-bagian itu. Seperti yang diungkapkan dalam Kamus Webster, analisa diartikan:

> *"A separating or breaking up of any whole into its parts aspecially wild an examination of these parts to find out their nature, proportion, function, interrelationship, etc"* (kamus komputer dan teknologi informasi (http://www.total.kamuskomputer.or.id) 15/07/2010).

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan analisa merupakan proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan.

Sisi mekanisme dan substantif, analisa dapat dilihat dari berbagai perspektif. Purnawan menjelaskan analisa dapat di lihat dari :

1. Secara Mekanis, dalam tahapan analisis akan terjadi:
   a) Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data jadi informasi yang lebih mudah dipahami.
   b) Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan hipotesis ataupun pendeskripsian variabel riset secara benar, bukan kebetulan saja.
   c) Penginterprestasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas, atau inferensi ke populasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
2. Secara Substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses:
   a) Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan.
   b) Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan.
   c) Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi bila ada kondisi tertentu

(Halim, 2002:35).

Persepektif analisis baik dilihat secara mekanis atau substantif maka akan lebih memudahkan dalam menganalisis. Selain itu, kita dapat menentukan dari sisi mana kita akan menganalisis. Analisa yang memungkinkan kita melakukan penelitian terhadap lebih dari dua *variable* secara bersamaan, dengan menggunakan teknik analisis ini maka kita dapat menganalisis pengaruh beberapa variable terhadap variabe –variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan.

2.1.2 Macam-Macam Analisa

Analisis merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan. Analisa diperlukan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang dihadapi dalam suatu aktivitas. Adapun terdapat beberapa macam analisis yang sesuai dengan kegunaannya yaitu:

1 Analisis Teknikal
Analisis Teknikal adalah analisis yang dimulai dengan cara memperhatikan instansi itu sendiri dari waktu ke waktu.
2. Analisis Kekuatan Relatif *(Relative Strength Analysis)*
Analisis Kekuatan Relatif adalah analisis yang berupaya mengidentifikasikan masalah yang memiliki kekuatan relative terhadap masalah lain.
3. Analisis Fundamental
Analisis Fundamental adalah suatu sekuritas memiliki nilai intrinsik tertentu (nilai tingkah lakunya). Nilai intrinsik suatu sekuritas ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dapat dari instansi. Analisis ini akan membandingkan nilai intrinsik suatu sekuritas dengan tingkah laku pegawai guna menentukan apakah sudah dapat diterapkan atau belum. Analisis ini akan memahami dan akhirnya mengevaluasi kinerja pegawai yang diterapkan.
4. Analisis Instansi Individual
Analisis Instansi Individual adalah analisis yang dilakukan dengan mengamati kinerja fungsi-fungsi instansi dan kepemimpinan para pegawai. Analisis ini akan mengetahui perkembangan dan kondisi kinerja pegawai.

(Halim, 2002:40).

Berdasarkan beberapa macam analisis di atas maka kita dapat nilai-nilai dan tingkah laku yang di miliki oleh intansi atau individu dan dapat di gunakan dalam mengambil keputusan untuk melangkah kedepan yang lebih baik.

2.2 Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan (Ali, 1995:1044). Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Adapun menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan (Nugroho, 2003:158).

Berbeda dengan Nugroho, menurut Van Meter dan Van Horn penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah /swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan (dalam Wahab, 1997:65). Berdasarkan pemaparan di atas penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

(Wahab, 1990:45).

Berdasarkan pengertian di atas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan dengan suatu sistem pengawasan, dengan adanya sistem program yang di laksanakan di harapkan akan mencapai target sasaran kepada masyarakat yang akan menerima manfaat dari program tersebut. Pelaksanaanya tidak hanya dapat di lakukan oleh suatu organisasi saja melainkan dapat juga di laksanakan oleh perorangan.

2.3. Pengertian *E-Government*

Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis *elektronik* dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;
2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Pengembangan *E-Government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

(http://id.wikipedia.org./wiki/ E-Government (13/07/2010/21:24 WIB).

Tujuan dari pembentukan jaringan ini adalah untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat yang memiliki kualitas dan dapat terjangkau ke seluruh wliayah Indonesia. Hubungan interaktif kepada dunia usaha diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nasional dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas. Adanya mekanisme dan saluran komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dengan harapan masyarakat dapat membantu merumuskan kebijakan Negara. Pembentukan sistem manajemen diharapkan dapat memperlancar transaksi yang di lakukan pemerintah maupun swsasta.

The World Bank Group memberi pengertian *E-Government* sebagai berikut :

> *E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government*. *E-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area network, internet* dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan" (dalam Indrajit 2002:3).

Menurut definisi yang dikemukakan di atas, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah secara *online* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Tujuan *E-Government* menurut Anwar dan Oetojo dalam rangka penerapan *E-Government* ini meliputi:

1. Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah;
2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini;
3. Menunjang *good governance* dan keterbukaan;
4. Meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

(Anwar dan Oetojo, 2004:126).

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan diterapkannya *E-Government* agar terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan dari pemerintah dengan cara mengaksesnya melalui Internet. Tujuan lainnya adalah untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini, untuk menunjang *good-governance* dan transparansi.

Penerapan *E-Government* menginginkan adanya perubahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang dikatakan M. Khoirul Anwar dan Asianti Oetojo S bahwa suatu sistem untuk penyelenggaraan pemerintahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terutama yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. (Anwar

dan Oetojo, 2003:136). *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaran pemerintahan oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat.

Pemikiran-pemikiran yang telah disebutkan diatas dan didukung dengan perkembangan *ICT* telah melahirkan suatu konsep baru yang disebut sebagai konsep *E-Government. World Bank* memberikan definisi untuk istilah *E-Government* yaitu penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, memiliki pengertian penyederhanaan praktek pemerintahan dengan mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi, dimana dari pengertian tersebut dibagi lagi menjadi dua pembidangan, yaitu :

Online Sevices adalah: Bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya ke luar baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis. Tetapi yang terpenting disini adalah pemerintah menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait, contohnya seperti pembayaran retribusi, pajak properti atau lisensi. (Anwar dan Oetojo, 2003:136)

E-Government Operations: adalah kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah, lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti electronic procurement, manajemen dokumen berbasiskan

web, formulir elektronik dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet. (Anwar dan Oetojo, 2003:136)

Berdasarkan pengertian di atas konsep *E-Government* tidak terbatas pada pengertian yang telah dijabarkan, karena masing-masing negara yang menerapkan konsep *E-Government* ini memiliki pengertian masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dari negara itu sendiri.

2.3.1. Faktor-Faktor Pengembangan *E-Government*

Terdapat beberapa faktor dalam pengembangan *E-Government* faktor tersebut berasal dari faktor teknologi, ekonomi, globalisasi, nasional serta lokal. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor teknologi, peradaban manusia dari tatanan masyarakat agraris dan industrialis menuju masyarakat informasi.
2. Faktor ekonomi, dalam era reformasi terjadi transformasi dari ekonomi konvensional ke arah ekonomi digital dan ekonomi jaringan.
3. Faktor globalisasi, dengan liberalisasi perdagangan batas negara di bidang ekonomi semakin pudar, maka sangat perlu perencanaan yang matang dan menyeluruh di bidang teknologi informasi dan menciptakan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi yang memadai serta meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
4. Faktor nasional, era reformasi menuntut suatu pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab kepada rakyat.
5. Faktor lokal, adanya sektor pariwisata yang sangat perlu promosi potensi wisata. Disamping itu keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terbukti tahan hidup dalam kondisi ekonomi yang kritis.

(Indrajit, 2002:27).

Penerapan *E-Government* merupakan suatu media dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan aktivitas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Peningkatan

kemampuan aparatur pemerintah dalam penerapan *E-Government* senantiasa dikembangkan agar mampu bersaing di tengah persaingan global dan perdagangan bebas yakni dengan menggunakan pemerintahan yang berbasis *elektronik*.

Penggunaan teknologi informasi dengan (media Internet), sebagai alat bantu, tujuan pemanfaatan melalui konsep *E-Government* pemerintahan dapat berjalan efektif, dengan teknologi informasi atau Internet, seluruh proses dan prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan cepat dan digunakan dengan tepat.

Menurut Anwar dan Oetojo dalam menerapkan *E-Government* harus memiliki komponen utama yang terdiri atas:

1. jaringan komputer atau Internet;
2. pengembangan piranti lunak layanan sistem informasi;
3. sumber daya untuk mengelola dan memelihara sistem *E-Government* yang sedang dan telah dibangun
4. komponen dasar pengembangan *E-Government* antara lain pengembangan pelayanan publik, memperkaya informasi melalui website informasi, pengembangan media komunikasi dan akses masyarakat,

(Anwar dan Oetojo, 2004:127).

Berdasarkan pendapat di atas, untuk menerapkan *E-Government*, pemerintah harus memiliki komponen utama seperti komputer atau jaringan Internet, pengembangan piranti lunak layanan sistem informasi, sumber daya manusia yang akan mengelola dan memelihara sistem *E-Government* yang sedang dan telah dibangun. Komponen dasar pengembangan *E-Government* antara lain pengembangan pelayanan publik melalui Internet, layanan-layanan informasi pemerintahan melalui website informasi pemerintah, dan pengembangan media komunikasi untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah.

2.3.2. Indikator-Indikator dalam Penerapan *E–Government*

Penerapan *E-Government* terdapat indikator-indikator penting yang harus diperhatikan. Menurut Indrajit indikator-indikator tersebut meliputi:

1. data infrastruktur
2. infrastruktur legal
3. infrastruktur institusional
4. infrastruktur manusia
5. infrastruktur teknologi
6. strategi pemikiran dan kepemimpinan.

(Indrajit, 2002:25).

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka penerapan *E-Government* harus memenuhi berbagai hal seperti data infrastruktur yang memadai dan infrastruktur legal. Disamping itu kemampuan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam menerapkan teknologi informasi yang berbasis *E-Government*, hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Data infrastruktur

Kesiapan data infrastruktur tersebut meliputi manajemen sistem,dokumentasi dan proses kerja ditempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung menuju penerapan *e-Governmen* (Indrajit, 2002:25). Kemampuan mendokumentasi juga menjadi bagian dari standar penerapan *E-Government*. Dengan adanya dokumentasi maka prose mengevaluasi jadi lebih mudah.

2. Infrastruktur legal

Dasar hukum dan peraturan-peraturan merupakan landasan dalam penerapan *E-Government* (Indrajit, 2002:25). Selain itu dasar hukum dan peraturan-peraturan dijadikan strategi dari pemerintahan untuk menerapkan *E-Government*

secara berkesinambungan. Adapun dasar hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun Surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum.

3. Infrastruktur institusional

Infrastruktur institusional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dalam membangun *E-Government*. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan baik antar lembaga tentang penerapan *E-Government* (Indrajit, 2005:25). Selain melakukan koordinasi dapat juga dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga (Indrajit, 2002:26).

4. Infrastruktur manusia

Penerapan *E-Government* dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan sumberdaya aparatur, karena penerapan *E-Government* yang harus didukung dengan aparatur yang berkompeten dibidang teknologi informasi (Indrajit, 2002:26). Adapun upaya untuk menciptakan sumberdaya aparatur yang berkualitas melalui pelatihan dan pendidikan yang berbasis teknologi informasi. Infrastruktur manusia merupakan hal yang penting dengan adanya sumberdaya manusia yang mendukung maka pelaksanaan penerapan *E-Government* dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

5. Infrastruktur teknologi

Inisiatif penerapan *E-Government* banyak bertumpu pada infrastruktur teknologi maka implementasi penerapan *E-Government* harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Dengan adanya infrastrukutr teknologi yang memadai maka penerapan *E-Government* akan berjalan sebagaimana mestinya

(Indarajit, 2002:26). Adapun untuk mengetahui ketersediaan sarana teknologi yang dimiliki maka dapat dilihat melalui jumlah komputer atau sarana teknologi lainnya yang menunjang dalam penerapan *E-Government* serta adanya jaringan komputer untuk lebih memudahkan dalam mengaksesn. (Indrajit, 2002:26).

6. Strategi pemikiran dan kepemimpinan

Penerapan *E-Government* di dalam pelaksanaannya membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang berkaitan dengan *E-Government*. Hal tersebut diperlukan agar agenda strategi serta pemikirannya yang berkaitan dengan *E-Government* akan diwujudkan secara nyata, disamping itu juga pemimpin yang mempunyai wawasan tentang *E-Government* dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *E-Government* secara operasional (Indrajit, 2002:27).

2.4 Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen

2.4.1 Pengertian Sistem

Sistem merupakan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan saling keterkaitan tersusun secara sistematis. Sistem menurut Jogiyanto adalah: *Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. (Jogiyanto, 1999:4).* Pengertian sistem menurut pendapat di atas, bahwa sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian atau komponen-komponen subsistem atau bagian dari sistem yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan dalam menjalankan fungsi tertentu yang mempengaruhi proses dari setiap subsistem atau bagian sistem secara keseluruhan untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Sistem informasi adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. (Raymond McLeod, Jr., 1996). Sistem informasi manajemen adalah manajemen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yangberguna untuk tingkatan manajemen di dalam kegiata perencanaan dan pengendalian.

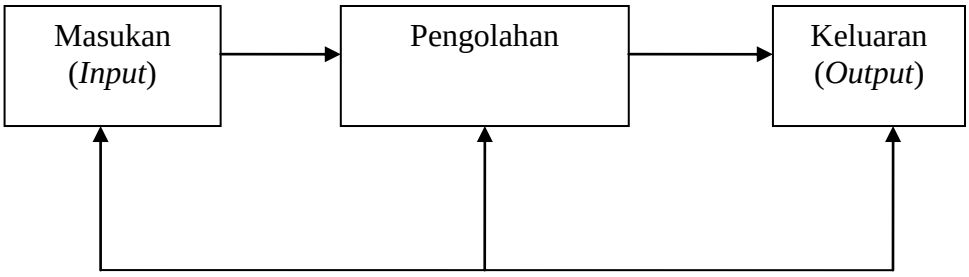
Sistem informasi adalah satu kesatuan yang sliang berhubungan satu sama lain. *Suatu sistem dapat didefenisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.* Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com

Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian *(subsystem).* Misalnya, sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Masing-masing subsistem dapat terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil lagi atau terdiri dari komponen-komponen. Subsistem perangkat keras *(hardware)* dapat terdiri dari alat masukan, alat pemroses, alat keluaran dan simpanan luar. Subsistem-subsistem saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Interaksi dari subsistem-subsistem sedemikian rupa, sehingga dicapai suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi *(integrated).* komponennya saling bekerja sendiri-sendiri tidak terintegrasi, maka tujuan dari sistem komputer tersebut tidak akan tercapai.

2.4.2 Bentuk Umum Sistem

Bentuk umum dari suatu sistem terdiri atas masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*), dalam bentuk umum sistem ini bisa melakukan satu atau lebih masukan yang akan diproses dan menghasilkan keluaran sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya.

Bagan 2.1
Model Sistem



Sumber : Scott (1996:6)

Bagan diatas menunjukan bahwa sistem atau pendekatan sistem minimal harus mempunyai empat komponen, yakni masukan, pengolahan, sasaran dan balikan atau kontrol.

1. Masukan (Input)
   Adalah energy/data yang dimasukkan ke dalam sistem SSIM_PKBN dand data tersebut di peroleh mulai dari tingkat desa sampai provinsi.
2. Keluaran (Output)
   Merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Juga merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem. Output dapat berupa keluaran.
3. Pengolah (Process)
   Suatu sistem mempunyai bagian pengolah yang akan mengubah input menjadi output. Dalam SSIM-PKBN pengolahan data dilakukan untuk dapat mempermudah sosialisasi KB pada masyarakat.

4. Sasaran (*Objective*)

   Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Sasaran dari SSIM-PKBN adalah ingin dapat meningkatkan kesadaran menggunakan KB pada masyarakat.

(Scott 1996:6)

Sementara Mc Leod mendefinisikan :

> Sistem sebagai kelompok elemen–elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama dalam mencapai tujuan akan tetapi secara umum proses yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya adalah dengan mengubah sumber daya *input* menjadi sumber daya *output*. (Mc Leod, 1995:14-18).

Berdasarkan definisi di atas, sistem merupakan kesatuan dari beberapa elemen – elemen yang terintegrasi dalam mencapai suatu tujuan yang sama. Pelaksanaan tujuan sistem berdasarkan proses yang dilaksanakan oleh organisasi. Tujuan dari proses tersebut adalah mengubah sumber daya *input* yang akan menghasilkan sumber daya *output.*

Sumber daya mengalir dari elemen *input* melalui elemen transformasi kepada elemen *output* dan untuk menjamin prosesnya maka dibutuhkan mekanisme *contro*l, dari uraian konsep–konsep mengenai sistem tersebut, Suradinata menjelaskan bahwa pada dasarnya sistem dapat dilihat dari karakteristiknya, yakni:

1. Adanya komponen sistem (sub sistem) yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk suatu kesatuan yang mempunyai sifat – sifat sistem.
2. Terdapat batas sistem baik antar subsistem maupun antar sistem yang dikenal dengan lingkungan.
3. Lingkungan luar sistem adalah semua yang berada di luar sistem yang mempengaruhi operasional sistem.

4. Penghubung sistem adalah media antar subsistem yang memungkinkan mengalirnya sumber daya.
5. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai.

(Suradinata, 1996:8-9)

Berdasarkan definisi di atas terdapat beberapa unsur karakteristik pembangun sistem. Sistem terdiri atas sub sistem yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam membentuk suatu kesatuan yang mempunyai sifat-sifat sistem. Setiap sub sistem memiliki batasan-batasan khusus yang dikenal dengan lingkungan. Lingkungan luar sistem merupakan karakteristik yang mempengaruhi oprasional sistem. Sistem dihubungkan melalui media antar sub sistem yang mengalirkan sumber daya. Karakteristik dari sebuah sistem merupakan gabungan sub sistem yang memiliki tujuan yang sama.

Kelima karakteristik di atas, unsur dari sistem dapat mempengaruhi keberhasilan suatu tujuan sistem. Tanpa adanya salah satu dai unsur tersebut diatas, maka suatu sistem tidak akan berjalan. Karena sistem merupakan gabungan dari elemen–elemen yang berbeda.

2.4.3 Karakteristik Sistem

Karakteristik sistem adalah kegiatan yang mempengaruhi untuk mendapatkan sebuah informasi Jogiyanto mengemukakan, bahwa karakteristik sistem yaitu sebagai berikut :

1. komponen-komponen (*component*)
   komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.
2. batas sistem (*boundary*)
   batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.
3. lingkungan luar (*environment*)

lingkungan luar dari suatu sistem atau apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

4. penghubung sistem (*system interface*)
   penghubung sistem mempunyai media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya.
5. masukan sistem (*system input*)
   masukan (*input*) istem adalah energi yang dimasukan kedalam sistem
6. keluaran sistem (*system output*)
   keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.
7. pengolahan sistem(*system processing*)
   suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.
8. sasaran sistem
   suatu sistem mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*) lingkungan luar.

(Jogiyanto, 1999:13).

Berdasarkan pendapat di atas, karakter sistem merupakan kegiatan yang mempengaruhi untuk mendapatkan informasi. Karakter sistem merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah komponen sistem, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena bersifat saling keterkaitan satu sama lain, serta saling berhubungan.

2.4.4. Pengertian Sistem Informasi

Perkembangan informasi berbasis komputer ini, pemerintah daerah juga dituntut agar siap dalam mengoprasionalkan semua pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem komputerisasi. Melengkapi pandangan tersebut, maka diuraikan mengenai sistem, data dan informasi, M. Khoirul Anwar dalam buku *SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah* menjelaskan pengertian sistem, sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai

beberapa tujuan (Anwar, 2004:4). Sedangkan pengertian data menurut Wahyono, data adalah bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda dan sebagainya (Wahyono, 2004:2).

Menurut Wahyono, informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambrkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan (Wahyono, 2004:3). Kegunaan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Sedangkan nilai dari pada informasi ditentukan oleh manfaat, biaya dan kualitas maksudnya bahwa informasi dianggap bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya.

Menurut Sondang, informasi yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: lengkap, mutakhir, akurat, dapat dipercaya, dan disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditelusuri untuk digunakan sebagai alat pendukung proses pengambilan keputusan apabila diperlukan (Sondang, 2006:76). Jadi sistem informasi merupakan bagian dari hasil pengolahan data yang lebih berguna bagi penerimanya dan mempunyai syarat lengkap, mutakhir, akurat, dapat dipercaya, dan disimpan sedemikian rupa. Begitu juga dengan sistem informasi administrasi kependudukan yang merupakan bagian dari hasil pengolahan data yang sudah berbentuk dan berguna bagi kepentingan atau kegiatan administrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka antara sistem, data dan informasi memiliki kesinambungan yang saling melengkapi. Data merupakan bahan baku atau bahan awal bagi suatu informasi dari data-data yang masih bersifat acak kenudian data tersebut disaring untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya data yang sudah menjadi informasi tersebut akan menjadi sistem informasi, yaitu bagian dari komponen-komponen yang berasal dari hasil pengolahan data, yang kenudian akan di informasikan kepada seseorang yang memerlukan informasi tersebut.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih, maka dalam pengolahan data secara elektronik sangat mendukung dalam berbagai kegiatan atau aktivitas. Pengolahan data secara elektornik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dengan menggunakan komputer yang mencangkup pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, dan pengawasan hasil pengolahan tersebut. Informasi akan berkualitas apabila informasi tersebut bernilai dan bermanfaat.

Pertama, kualitas informasi harus akurat, informasi tersebut harus berdasarkan dari kesalahan atau kebenaran yang terjadi di lapangan atau lokasi dan informasi tersebut tidak bias atau bahkan menyesatkan bagi seseorang yang memerlukan informasi tersebut. *Kedua,* informasi harus tepat waktu, informasi yang disampaikan kepada seseorang atau pihak yang memerlukan tidak boleh terlambat. Apabila informasi itu tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak bermanfaat dan tentunya merugikan pihak lain. *Ketiga,* informasi harus relevan, informasi tersebut harus memberikan manfaat bagi yang memerlukannya, karena

informasi akan bermanfaat bagi seseorang atau penerima informasi apabila infomasi tersebut saling berkaitan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya.

Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Jika ada pertanyaan dari mana informasi bisa didapatkan maka jawabannya adalah sistem informasi. Gordon, menyatakan:

> "Sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur yang diorganisasikan bilamana dari eksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dari dalam organisasi". (Raymond McLeod,Jr.,1996 dalam Gordon)

Computer Based Information System (CBIS) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut juga Sistem Informasi Berbasis Komputer merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem Informasi yang akurat dan efektif, dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah *"computer-based"* atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Sistem Informasi "berbasis komputer" mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi.

Raymond, menyatakan:

> "Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data dan mengendalikan serta melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan". (Raymond McLeod,Jr.,1996)

Berdasarkan beberapa uraian di atas bahwa informasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terorganisir untuk melakukan proses yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Seiring dengan peningkatan kebutuhan akan pengolahan informasi dalam hal kecepatan dan keamanan diperlukan jalan alternatif yang kemudian ditemukan sistem informasi.

Sistem informasi merupakan bentuk penerapan dalam sebuah organisasi, dimana penerapan/penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi tersebut untuk mendukung dalam mengumpulkan dan mengolah data dan menyediakan informasi yang berguna di dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Suatu organisasi yang tumbuh dan menjadi lebih kompleks membuat manajemen melakukan permintaan yang semakin besar terhadap fungsi sistem informasi. Mereka membutuhkan untuk dapat melakukan akses terhadap data kapanpun dan dimanapun dengan mudah, akurat dan konsisten, sistem informasi yang cepat dapat mengikuti perubahan kondisi.

Menurut pendapat Tata Sutabri dalam bukunya *Sistem Informasi Manajemen* mendefinisikan sistem informasi, sebagai berikut:

> "Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi, yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan" (Sutabri, 2005:42).

Berdasarkan hal tersebut sistem informasi adalah suatu sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi adalah (kesatuan) formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik maupun logika. Organisasi ke organisasi, sumber daya ini disusun atau distrukturkan dengan beberapa cara yang berlainan, karena organisasi dan sistem informasi merupakan sumber daya yang bersifat dinamis.

Lebih lanjut menurut pendapat James B. Bower dkk dalam bukunya *Computer Oriented Accounting Informations System* yang dikutip Teguh

Wahyono dalam bukunya *Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisi Desain dan Implementasi* menjelaskan pengertian sistem informasi, sebagai berikut:

> "Sistem informasi merupakan suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan untuk organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan" (dalam Wahyono, 2004:17).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur informasi penting guna memproses tipe transaksi rutin tertentu yang menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Sistem informasi juga merupakan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi.

Menurut Alter sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi (Alter dalam Abdul, 2002:17). Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa sistem informasi merupakan kumpulan kegiatan yang diintegrasikan antara program kerja, informasi ke dalam suatu *server database* sehingga keinginan suatu organiasi dalam mencapai tujuan bisa terwujudkan.

Sehubungan dengan definisi di atas, Menurut Robert A. Letch dan K. Roscoe Davis sistem informasi adalah :

> "sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan."(K. Roscoe Davis dalam Jogiyanto, 1999:11)

Berdasarkan definisi di atas, sistem informasi merupakan kumpulan informasi-informasi yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lainnya untuk keperluan tertentu. Data yang masuk ke sistem akan jadi informasi sebaimana yang dengan informasi yang di perlukan. Adapun kegiatan sistem informasi menurt Jogiyanto, sebagai berikut:

a. *Input*, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk proses.
b. Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah.
c. Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data.
d. *Output*, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari suatu proses informasi.
e. Kontrol, suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

(Jogiyanto, 1999:20).

Berdasarkan pendapat di atas, sistem informasi merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari *input*, proses, *output*, dan kontrol yang tersusun secara sistematis. Sistem informasi tidak terlepas dari kegiatan yang diungkapkan pendapat di atas, karena dalam bekerja sistem tersebut terdiri dari rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisah atau dibagi dalam bekerja dan saling berhubungan satu sama lainnya.

2.4.5 Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. (Raymond McLeod, Jr., 1996). Sistem informasi manajemen adalah manajemen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang

berguna untuk tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

Proses pengelolaan sistem informasi diperlukan sebuah manajemen yang baik, dalam bagian ini akan dijelaskan tentang konsep manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan sistem informasi manajemen. Beberapa pendapat dari para ahli yang mengemukakan konsep tentang manajemen, Khoirul Anwar mengutip definisi manajemen dari Frederick W. Taylor, dikatakan bahwa manajemen adalah kegiatan sehari-hari dalam pemerintahan yang tidak efisien sehingga perlu dilakukan kegiatan yang sistematis (Frederick W. Taylor dalam Khoirul Anwar, 2004:12). Khoirul Anwar mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*, bahwa manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumberdayanya (Khoirul Anwar, 2004:12).

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Karena itu dalam menjalankan suatu organisasi, segala macam aktifitas yang telah direncanakan sangat berkepentingan sekali dengan manajemen, dan manajemen sangat erat sekali kaitannya dengan kepemimpinan, peranan antar pribadi, pemberi informasi dan pengambilan keputusan sehingga proses manajemen dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sebagai alat pencapai tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak dalam tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. menurut Salih bahwa manajemen adalah sebagai kemampuan atau katerampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. (Salih, 1989: 9).

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa manajemen itu merupakan suatu kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi dan mengatur orang lain, diarahkan atau dikelompokan kepada sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu, baik berupa sumber daya manusia atau sumber daya lainnya melalui tindakan-tindakan berantai dari mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan

Manajemen merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi. Organisasi bisa dikatakan berhasil, apabila sudah mengatur anggota-anggotanya untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Menurut Andrew F. Sikula manajemen adalah:

> "*Management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating and decision making activities performade by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product to service.* (Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. (Andrew F. Sikula dalam Hasibuan,1996:2).

Berdasarkan definisi di atas, manajemen merupakan kegiatan untuk mengatur suatu perencanaan supaya tujuan organisasi tercapai dengan baik. Kegiatan untuk meneta manajemen, terdiri dari adanya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, dan motivasi. Sehingga tercipta koordinasi yang baik sesama anggota yang melaksanakan organisasi tersebut.

G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang dikutif oleh Dharma Setyawan Salam bahwa :

> *Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives.*
> Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (G.R. Terry dalam Salam, 2004: 11).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat di katakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin. Berdasarkan penjelasan di atas sebagai inti manajemen dikenal istilah kepemimpinan, sedangkan sebagai inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

pengertian manajemen menurut, Melayu S.P. Hasibuan adalah :

> *Management is a distinet process consisting of planing, organizing, actuating, and controling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being ang other resources.*
> Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. (Hasibuan, 1995:3).

Berdasarkan penjelasan diatas, manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan koperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Manajemen memiliki fungsi tersendiri dalam sebuah kegiatan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efesien. Menurut Dr. Muh. Ilham, M.Si bukunya *Manajemen Sumber Daya dan Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah,* bahwa fungsi manajemen ada lima , yaitu :

1. Perencanaan.
2. Pengorganisasian.
3. Penstafan.
4. Pemimpin.
5. Pengendalian.

(Ilham, 2008:05)

Berdasarkan pendapat diatas, fungsi manajemen tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan sebuah perencanaan yang matang di harapkan mendapatkan hasil yang di inginkan. menurut, Dr. Muh. Ilham, M.Si sebagai berikut:

Perencanaan adalah menetapkan tujuan dan standar; mengembangkan standar dan prosedur; mengembangkan rencana dan peramalan-peramaln atau memproyeksi beberapa peristiwa dimasa yang akan datang (Ilham, 2008:05). Menurut Dharma Setyawan Salam, perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Salam, 2004:14).

Hal ini sejalan dengan pendapatnya Melayu S.P. Hasibuan bahwa :

> "Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan" (Hasibuan, 1995:95).

Berdasarkan penjelasan diatas, perencanaan adalah usaha untuk melakukan tindakan/pekerjaan dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan pada masa akan datang dengn merumuskan sebuah perencanaan bermaksud ingin mencapai tujuan yang di harapkan berjalan dengan yang di inginkan oleh sebuah intansi/organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun swasta, semunya berkeinginan mencapai tujuan yang telah di rencanakan oleh intansi tersebut.

Menentukan sebuah rencana ada jenis-jenis rencana yang harus diperhatikan dalam menentukan sebuah rencana, jenis rencana tersebut menentukan sebuah rencana itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berjalan. Dalam hal ini ada beberapa jenis-jenis rencana menurut Dharma Setyawan Salam dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan Indonesia*.

> Jenis-jenis rencana itu ialah:
> 1. Kebijakan adalah pernyataan atau pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan.

2. Anggaran adalah suatu ihtiar dari hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut dinyatakan dalam kesatuan uang.
3. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian yang harus dilaksanakan.

(Salam, 2004:15).

Berdasarkan definisi di atas, bahwa fungsi perencanaan ini mencakup juga penetapan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, dalam sebuah perencanaan ada anggaran yang hal lain yang harus di perhatikan yaitu anggaran. Anggaran adalah ihtiar untuk sebuah rencana yang di harapkaan. Perencanaan yang baik memiliki serangkaian prosedur ynag utama yaitu waktu yang tepat dalam merumuskan sebuah rencana yang ingin di capai. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini adalah kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi secara proposional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Ada beberapa keuntungan dalam perencanaan yaitu :

1. Dengan adanya perencanaan tujuan jelas, obyektif dan rasional.
2. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur dan ekonomis.
3. Perencanaan akan meningkatkan pendayagunaan semua fasilitas yang dimiliki.
4. Perencanaan menyebakan semua aktivitas teratur dan bermanfaat.
5. Perencanaan dapat memperkecil resiko.
6. Perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian.
7. Perencanaan merangsang prestasi kerja.
8. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap.

(Hasibuan, 1995:111).

Keuntungan dari sebuah perencaan yang baik mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam merumuskan sesuatu pekerjaaan yang akan dilaksanakan sehingga hasil yang di inginkan sesuai dengan tujuan yang di rencanakan. Keuntungan dari sebuah perencanaan dapat mengefektipkan waktu dalam

pendayaguanaan fasilitas yang di miliki dan perencaan juga memperkecil resiko kegagalan yang tidak di inginkan dalam mencapai tujuan yang di rencanakan. Perencanaan juga dapat merangsang prestasi kerja yang lebih baik. Keuntungan dari perencanaan juga dapat memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan baik dan jelas.

Ada beberapa syarat perencanaan yang baik adalah :
1. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan.
2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data dan fakta.
3. Menetapkan beberapa alternatif.
4. Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana.

(Hasibuan, 1995: 112).

Perencanaan yang dilaksanakan dengan baik, maka akan dihasilkan suatu tujuan yang baik dengan memperhatikan syarat-syarat perencanaan yang berdasarkan kesepakatan bersama.perencaan harus di dasarkan pada informasi, data dan fakta yang aktuan dan dapat di percaya sehingga informasi yang di terima tidak berupa fiktip.

Fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengertian Pengorganisasian dan organisasi berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan hal yang statis yang menggambarkan pola-pola, skema, bagan dan menunjukan garis-garis perintah serta hubungan-hubungan yang ada. Organisasi hanya merupakan alat, dan wadah tempat sekelompok orang yang mempunya tujuan yang sama. Organisasi di pimpin oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan Pengorganisasian dengan organisasi adalah hasil dari pengorganisasian

yaitu apabila organisasi baik, maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai.

> Organisasi ini terdiri dari dua bagian dasar yaitu :
> 1. Bagian-bagian/departemen/devisi.
> 2. Hubungan-hubungan, yakni hubungan antar manusia, antar departemen yang harus ditetapkan dengan jelas dan tegas.
>
> (Hasibuan, 1995: 121).

Penetapan hubungan-hubungan ini merupakan salah satu sayarat tercapainya kerja sama *(Team work)* antara pegawai. Organisasi dalam sebuah intasi adanya hubungan antara manusia dengan manusia atau suatu organisasi dengan organisasi lain. Pengorganisasian menurut para ahli sebagai berikut :

> "Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan memerlukan aktifitas tersebut" (Hasibuan, 1995:123).

Berdasarkan pendapat diatas, pengorganisasian adalah sekelompok orang yang bekerja sama, dan mempunyai tujuan yang sama dengan adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, serta adanya pendelegasian wewenang.

> Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai kegiatan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan (Salam, 2004:19).

Berdasarkan pendapat di atas, maka fungsi pengorganisasian ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang. Pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh unit-unit organisasi seperti pendelegasian wewenang untuk

melaksanakan pekerjaan, dengan menempakan seseorang dalam sebuah organisassi haruslah tepat dengan kemampun yang di milikinya supaya tidak terjadi kesalahan yang tidak di harapak karena salah merekrut pegawai yang sesuai. Pengorganisasian memiliki hubungan informasi vertikal dan horizontal, dalam suatu koordinasi yang efektif dan efesien.

Ada beberapa tahap dalam proses pengorganisasian yaitu:
1. Penentuan kegiatan adalah seorang pimpinan harus mengetahui dan merumuskan kegiatan yang diperlukan serta menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Pengelompokan kegiatan harus mengelompokan kegiatan atas dasar tujuan yang sama, hal ini berdasarkan atas dasar proses atau peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan.
3. Pendelegasian wewenang adalah seorang pemimpin harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada bawahan.

(Salam, 2004:19).

Fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan seorang pemimpin yang dapat merumuskan kegiatan yang diperlukan. Pengorganisasian juga berkaitan dengan pengelompokan dengan asas tujauan yang sama. Pemimpin harus dapat mendelgasikan wewenang pada bawahannya yang sesuai dengan yang di butuhkan. Pengertian menurut Dr. Muh. Ilham, M.Si dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya dan Kinerja Aparatur Pemerintahan daerah* adalah memutuskan tipe atau jenis orang yang akan dipekerjakan; merekrut calon karyawan; mengevaluasi kinerja; menyuluh karyawan; melatih dan mengembangkan karyawan.

Ada beberapa proses dalam fungsi penstafan,yaitu:
1. Memutuskan tipe atau jenis orang yang akan dikerjakan.
2. Merekrutcalon karyaawan.
3. Mengevaluasi kinerja.
4. Menyuluh karyawan.
5. Melatih dan mengembangkan karyawan.

(Ilham, 2008:05).

Fungsi pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai. Apabila kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik dalam suatu organisasi, maka harus dikendalikan supaya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut, terarah dan terencana dengan baik. Pemimpin yang baik harus dapat mengendaliakan keadaan pegawai yang bekerja tidak sesuai.

> Beberapa proses pengendalian melalui tahap-tahap sebagai berikut:
> 1. Menentukan standar atau dasar kontrol agar pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.
> 2. Ukuran yang telah ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
> 3. Melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar penyimpangan dan kesalahan dalam melakukan kegiatan dapat dicegah serta diperbaiki.
>
> (Salam, 2004:21).

Pengendalian diharapkan dapat bemanfaatan bagi semua unsur manajemen supaya efektif dan efesien. Ukuran yang diterapakan harus sesuai dengan yang di harapkan, perlu melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dan kesalahan.

Sejalan dengan defenisi di atas, Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah mengemukakan, bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. (Ernie dan Saefullah, 2006:6).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa manajemen merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen merupakan kegiatan untuk mengatur anggotanya supaya mau melakukan kegiatan yang dibebankan kepadanya.

2.5. Pengertian Sub Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Berencana Nasional (SSIM-PKBN)

Kegiatan yang di lakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam rangka menerapkan *E-Government* membangun sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk menjalankan pemerintahan yang berbasis elektronik. Sarana yang dapat digunakan dalam mengakses adalah dengan mengakses langsung melalui komputer yang ada di BKKBN yang sudah terhubung dengan beberapa komputer di setiap bagian di BKKBN atau yang di sebut *server* dan menggunakan fasilitas jaringan *wifi* di lingkungan BBKBN Jawa Barat.

Kegiatan yang dilakukan demi tersedianya data dan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengambil keputusan, *website www.bkkbn.go.id* didalamnya terdapat sebuah sistem yaitu Sub Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Berencana Nasional (SSIM-PKBN) merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakan. Data dan informasi di lingkungan BKKBN mendapat perhatian utama dengan ditunjuknya tugas dan fungsi tersebut disusun berdasar tahap/proses dimulai dari pengumpulan, pelaporan dan statistik, pengolahan dan pengembangan teknologi informasi, analisis dan evaluasi program, diseminasi dan dokumentasi serta penyebarluasan informasi.

Sejalan dengan penggunaan komputerisasi dalam pengumpulan dan pelaporan yang dilakukan sejak tahun 1970 dan periode-periode selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi untuk dilakukan penyesuaian, hingga saat ini, *database* sudah dilaksanakan dengan menganut desain *Web-based* yang dapat diakses dengan multi users dan melalui internet.

Berdasarkan hal tersebut secara nyata dilaksanakan pengembangan dan pemantapannya sejak tahun 2001 melalui Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga di beberapa Kabupaten/ Kota, oleh karena itu pembentukan dan pembangunan Bank Data Keluarga Berencana saat ini merupakan asset dan komoditi yang dapat dipergunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan database keluarga.

Sistem dan mekanisme yang ada utamanya dengan pendayagunaan teknologi informasi adalah menjadi modal dasar BKKBN untuk turut melaksanakan *E-Government* sesuai dengan INPRES No. 3 Tahun 2003. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik, dalam persebaran urusan pemerintahan ke Pemerintah daerah dilandasi dengan prinsip dalam kerangka NKRI.

Adanya *website www.bkkbn.go.id* masyarakat dapat dengan mudah untuk mengetahui informasi mengenai program keluarga berencana. SSIM-PKBN itu sendiri disediakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri mengenai pemerintahan yang berbasis *elektronik* khususnya mengenai masalah KB.

2.6 Pengertian *Website*

Perkembangan *internet* yang sangat cepat telah membentuk suatu komunitas pengguna *internet* yaitu *world wide web* (*www*) atau *website*. *Website* merupakan suatu pergeseran paradigma yang menawarkan cara kerja baru untuk memperlancar komunikasi, pelayanan dan proses bisnis di dalam perekonomian dan pemerintahan yang saling terkoneksi. *Website* harus mencerminkan aktivitas organisasi dan cara pandang organisasi terhadap media informasi ini. Pengertian *website* menurut Jack Febrian adalah:

> "Sebuah lokasi di *internet* yang memiliki akses ke semua pengguna *internet* dan dapat saling bertukar dokumen dengan cara menghubungkan satu sama lain dalam suatu jaringan yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi seperti kabel telepon" (Febrian, 2001:180).

Website merupakan alamat di *internet* yang memudahkan pengguna *internet* untuk memenuhi kebutuhan informasi, melalui *website* pengguna *internet* dapat dengan mudah mencari informasi sesuai dengan kebutuhan. Hal senada juga dikemukakan Mico Pardosi, *Website* adalah dokumen dalam *internet* (lebih tepatnya URL atau alamat *internet*) biasa disebut juga *web* atau *homepage* (Pardosi, 2004:2). Penggunaan *website* menjadi suatu hal yang penting, baik bagi individu, organisasi dan pemerintahan. *Website* merupakan alamat di *internet* yang dapat di akses oleh siapa saja bagi mereka yang mengetahui alamat tersebut dengan menggunakan *browser*. *Website* berisikan data-data, informasi dan gambar.

2.6.1 Fungsi *Website*

Sistem pengaksesan informasi dalam *internet* yang paling terkenal adalah *website. Website* berkembang menjadi fasilitas untuk menampilkan *browser* elektronik dan menyebabkan meningkatnya penggunaan *intranet, ekstranet* juga *internet* adapun fungsi *website* adalah:

1) Memperlebar Ruang Promosi
2) Mempermudah Komunikasi
3) Berinteraksi.

(Safri, Muhamad Melalui *http//www.cert.or.id/muhammad/articels/e-gov-serdang* (2010/08/03/22:30 WIB.)

Website tidak sekedar hanya menyajikan informasi, akan tetapi *website* di dapat memperluas jaringan promosi, saling berkomunikasi melalui *e-mail* ataupun informasi kontak yang ada pada *website*. Sehingga memudahkan untuk saling berkomunikasi walaupun perbedaan lokasi yang teramat jauh dan komunikasi yang dilakukan sangat efesien waktu. Interaksi yang dapat dilakukan dalam *website* diantaranya adalah transaksi jual-beli, forum diskusi, *upload atau download file* dan lain sebagainya. Unsur terpenting dari sebuah tampilan *website* adalah isi (*content*) dan desain yang baik dan menarik. Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat hendaknya mengembangkan *website* dengan isi yang selalu baru serta menyajikan informasi yang baik, jelas, dan singkat untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai program KB untuk masyarakat khususnya yang ada di Jawa Barat, serta mudah diakses. Pembentukan *website* pada pemerintahan dapat berfungsi menjadi sebuah pusat pelayanan dimana masyarakat dapat melakukan segala sesuatunya melalui *websit*e serta dapat mengakses informasi mengenai profil BKKBN, dasar hukum BKKBN,

berita BKKBN, rubrik BKKBN, info program BKKBN, galaery BKKBN, UPPKS, serta LINK. Harapan yang ingin dicapai dengan adanya *website* *www.bkkbn.go.id* adalah untu mempermudah masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang KB yang ada di Jawa Barat.

2.6.2 Elemen-Elemen yang Harus Dimiliki Sebuah *Website*

Website dapat dikatakan baik, apabila sebuah *website* memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1) Sistem pengorganisasian *content* atau isi *website* haruslah memiliki aristektur yang jelas dan terstruktur secara logis
2) Navigasi yang diterapkan dalam *website* haruslah mudah cara pengoperasiannya
3) Isinya harus *up-to-date* dalam arti kata selalu diperbaharui sehingga relevan dengan kebutuhan
4) Waktu untuk menampilkan satu halaman penuh *website* haruslah cepat (disarankan tidak lebih dari 10 detik), sehingga perlu dipertimbangkan ukuran memori total dari sebuah desain *website*
5) Tampilan *website* haruslah menarik dalam arti kata memiliki desain grafis yang sesuai dengan karakteristiknya *audience* nya
6) *Website* haruslah dapat dinikmati oleh semua orang, terlepas dari faktor perbedaan usia, agama, bahasa, maupun hal-hal lain yang terdapat di dalam masyarakat
7) Unsur privasi harus pula diperhatikan dalam arti kata para penggunaan *website* merasa yakin bahwa tidak hal-hal yang akan merugikan dirinya terkait dengan isu keamanan berinteraksi secara digital ketika mengakses *website*

(Indrajit, 2005:56).

Website merupakan sebuah media untuk kebutuhan pelayanan. Pembuat *website* harus mengetahui dan memperhatikan kebutuhan pengguna *website.* agar menarik minat pengguna *website* untuk selalu mengakses, pada dasarnya adalah tampilan *website* harus terstruktur secara logis, mudah dalam pengoperasian, informasi yang diberikan merupakan informasi terbaru, *loding* yang tidak terlalu

lama, desain grafis dari tampilan *website* harus sesuai dengan karakteristik pengguna *website*, dapat dinikmati oleh semua orang dan keamanan bagi penggunanya.

2.7 Pengertian Sosialisasi

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, pemerintah perlu menginformasikan potensi ekonomi untuk menarik perhatian investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah harus mensosialisasikan segala potensi diberbagai bidang untuk menarik perhatian para investor baik dalam negeri maupun asing, berkaitan dengan sosialisasi menurut Charles R. Wright adalah:

> "proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain" (Wright dalam Sutaryo, 2005:156).

Sejalan dengan pendapat di atas sosialisasi menurut Peter L. Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat (Berger dalam Sutaryo, 2005:156). Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Kegiatan sosialisasi terdapat interaksi antar manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa.

Fred. Greenstein menjelaskan pengertian sosialisasi dalam arti sempit dan luas, yaitu:

> 1) Penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab.
> 2) Semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.
> (Greenstein dalam Rush dan Althoff, 2002:35-36).

Berdasarkan pendapat di atas sosialisasi merupakan penanaman informasi yang disengaja atau tidak direncanakan oleh badan-badan untuk menanamkan nilai-nilai dan praktek-praktek pada setiap tahap siklus kehidupan dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit belajar saja. Sejalan dengan pendapat di atas sosialisasi menurut wikipedia Indonesia sosialisasi adalah:

> "sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu" (wikipedia Indonesia, melalui *http://id.wikipedia.org./wiki/sosialisasi* (13/07/2010/21:24 WIB).

Berdasarkan pendapat di atas sosialisasi merupakan penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi serta suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu

juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman kepribadiannya serta peranan dalam proses sosialisasi diajarkan peran- peran yang harus dijalankan oleh individu. Menurut Mochtar Maso'ed mengemukakan definisi mengenai sosialisasi adalah:

> "sosialisasi menunjukan cara bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat mereka, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharap akan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa"(Maso'ed, 1984:34).

Berdasarkan pendapat di atas, sosialisasi menunjukan kepada adanya proses pengenalan sikap dan tingkah laku yang nantinya akan menimbulkan peran di tengah masyarakat, dan akan terus berlanjut sepanjang peran yang ada dijalankan, dari anak-anak sampai dewasa kemudian proses ini tidak terlepas begitu saja tetapi proses ini akan mengikuti standar-standar nilai yang ada pada kelompok atau lingkungannya. Sedangkan menurut Alfian definisi mengenai sosialisasi adalah:

> "semua anggota masyarakat, secara langsung atau tidak langsung mengalami apa yang disebut dengan sosialisasi. Melalui proses sosialisasi itu anggota masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai tertentu yang oleh karena itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku mereka sehari-hari" (Alfian, 1986: 243).

Berdasarkan pendapat di atas, sosialisasi merupakan penanaman informasi secara langsung maupun tidak langsung yang menekankan pada masyarakat cara bagaimana masyarakat mewariskan, mengajarkan dan juga sebagai proses pembentukan sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya dan mempengaruhi sikap dan tingkah laku mereka sehari-hari.

2.7.2 Jenis Sosialisasi

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L. Berger dan Luckman terdapat dua jenis sosialisasi, yaitu:

> 1) Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak
> 2) Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.
>
> (Wikipedia Indonesia. Melalui http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi 13/07/2010.)

Bedasarkan definisi di atas, sosialisasi terdiri atas sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang pertama kali di jalani oleh individu. Sosialisasi primer berawal pada masa kanak-kanak ketika menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder merupakan proses sosialisasi setelah sosialisasi primer. Sosialisasi sekunder merupakan proses yang memperkenalkan individu ke dalam sebuah kelompok tertentu yang ada pada masyarakat.

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja, dalam kedua institusi tersebut terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan, dan diatur secara formal.

2.8. Pengertian Sosialisasi Keluarga Berencana Nasional

KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), maksud daripada ini adalah: "Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran"

dengan kata lain KB adalah perencanaan jumlah keluarga. Pembatasan bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970'an.

Mensosialisasikan KB kepada masyarakat yakni dengan cara pendekatan yang dipergunakan pada tahap permulaan ialah cara pribadi dan klinis statis (*pasif),* dengan lain perkataan seseorang hanya mendapat nasihat dan pelayanan bila ia datang memintanya ke klinik KB. Tahap selanjutnya Petugas KB juga di luar Klinik, bila ia melakukan kunjungan rumah menolong persalinan ataupun memeriksa bayi dan lain-lain.

Pendekatan yang di lakukan selanjutnya dikembangkan cara pendekataan multi disipliner mengingat program KB mempunyai kaitan dan mempengaruhi segala segi kehidupan. Maka jelas bahwa untuk mensukseskan program KB tersebut harus dilandasi 2 prinsip, yaitu :

1. Kepentingan Nasional,
2. Sukarela, Demokrasi dan hak-hak azazi manusia.

Penyebarluasan gagasan KB dengan berbagai bentuk dan cara kegiatan penerangan dan motivasi bersifat *persuasive* dan *edukatif,* dengan tujuan memberikan pengertian serta menanamkan keyakinan dan keinsyafan pada masyarakat Indonesia tentang KB sehingga kecil merupakan perikehidupan bangsa Indonesia.

Kesadaran tentang proses terjadinya penerimaan ide KB memerlukan waktu dan berbagai cara pencapainya, maka kegiatan-kegiatan penerangan dan motivasi dilakukan dengan 3 (tiga) macam cara yang digolongkan sebagai berikut:

a.Penerangan Umum

Melalui berbagai Media masa (Koran, Radio, Film, Baligo/spanduk di jalan-jalan protocol dan lain-lain) yang bertujuan utamanya adalah menciptakan suasana yang menguntungkan di dalam masyarakat sehingga memungkinkan berkembangnya ide KB.

b.Penerangan Kelompok

Kegiatan penerangan yang diberikan kepada sekelompok orang tertentu secara langsung sehingga dapat memperdalam pengertian dan keyakinan mereka mengenai ide KB.

c. Kombinasi tatap muka (*Face to face communication*)

Kegiatan yang dilakukan secara perorangan yaitu dengan kunjungan rumah, konsultasi dan bentuk kontak individual lainnya yang dilakukan oleh PLKB atau petugas lainnya secara sukarela dari masyarakat dan organisasi masyarakat seperti PKK, organisasi wanita, pemuda dan lain-lain.

Berdasarkan penjabaran di atas sosialisasi tentang KB pada masyarakat khususnya di BKKBN Jawa Barat telah mempunyai strategi yang baik dalam meningkatkan kesadaran menggunakan KB pada masyarakat agar tercipta masyarkat yang berkualitas dan memiliki sumber daya manusia yang tangguh dan mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini.